



PROVINSI RIAU

<https://dkp.riau.go.id/>



PERUBAHAN

RENCANA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DKP PROVINSI RIAU

TAHUN 2025

Jalan Pattimura No. 6
e-mail : dkpriau@gmail.com
Kode Pos 28131

PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Besyukur kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat, dan Karunia Nya atas Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat di selesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan mengedepankan skala prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Akhir kata atas nama seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, September 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU,



H. YURNALIS, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya/IV d
NIP. 19710417 200212 1 006

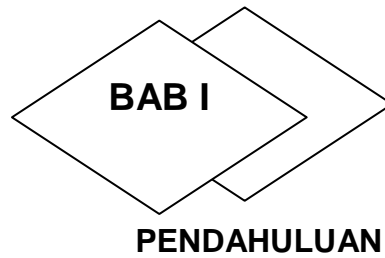
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis	6
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target	31
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan	39
2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan	45
2.1.4. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah	45
2.1.5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu di Ambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut	45
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.2.1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	47
2.2.2. Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	47
2.2.3. Meningkatnya Produksi Perikanan	47
2.2.4. Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan	48
2.2.5. Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	48
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	49
2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	49
2.3.3. Dampaknya Terhadap Penilaian Visi Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional NSPK,SPM,dan SDGs	49
2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.3.5. Formulasi Isu-Isu penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Di Rencanakan	52
2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD 2025	52
2.4.1. Proses Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan	52
2.4.2. Uraian Tentang Alasan Perbandingan tersebut di Lakukan	52

2.4.3. Penjelasan Tentang Temuan dan Catatan Penting Jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RPKPD Seperti Rumusan Program/Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan RPKD Termasuk Perbedaan Besaran Anggaran Kinerja	53
2.4.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RPKD Tahun yang di Rencanakan	53
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
2.5.1. Uraian tentang Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan	59
2.5.2. Uraian Tentang Kesesuaian Usulam Tersebut dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	59
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	89
BAB IV PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.29)	7
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel TC-30)	46
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau (T-C 31)	54
2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	71
3.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rancangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana telah tertuang dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yang dalam proses penyusunannya mempedomani RKPD Provinsi Riau Tahun 2023. Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan umumnya Provinsi Riau, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 guna menghasilkan Renja OPD yang berkualitas baik dengan mengacu pada:

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
- b. Upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 04) sebagai mana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2025 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk menyesuaikan kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah terkini terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 yang berkualitas baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau sampai dengan satu semester tahun berjalan ditemukan beberapa kondisi yang menjadi dasar dan pertimbangan Kepala Daerah untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025 dan diikuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 yang selanjutnya juga diikuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan serta sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Bab IV. Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.29)

KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program, (Outcome) dan Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2026)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	SEKRETARIAT										
3	25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						100 Persen	100 Persen	100
3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan					1 Laporan	0	0
3	25	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0
3	25	02	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi						5 Laporan	5 Laporan	100
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	143 orang / Bulan (100%)	143 orang	143 orang/ bulan (100%)	100	143 Orang	201 Orang	25,00
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola						1 Laporan	1 Laporan	100
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen	0	0
3	25	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan					14 Laporan	14 Laporan	100
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	100 persen (100 %)	7 Laporan	7 Laporan (100%)	100	14 Laporan	14 Laporan	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi						6 Jenis	6 Jenis	100	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket					2 Paket	0	0	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		46 paket (100%)	62 Paket	62 Paket (100%)	100	5 Paket	5 Paket	100
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		5 paket (100%)	10428 paket	10428 paket (100%)	100	5 Paket	5 Paket	100
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	59 Paket		15 paket (100%)	15 Paket	15 Paket (100%)	100	15 Paket	15 Paket	100
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588 Laporan		155 kali (100%)	1 Laporan	1 Laporan (100%)	100	155 Laporan	155 Laporan	100
3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11 Dokumen						11 Dokumen	0	0
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi							2 Jenis	2 Jenis	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 laporan (100%)	4 Laporan	4 Laporan (100%)	100	4 Laporan	4 Laporan	100
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan		44 laporan(100%)	41 Laporan	41 Laporan(100%)	100	44 Laporan	44 Laporan	100
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan							2 Jenis	2 Jenis	100
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 Jenis		14 unit (100%)	15 Unit	15 Unit (100%)	100	14 Unit	14 Unit	100
3	25	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit						3 Unit	3 Unit	100
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan							27 Jenis	27 Jenis	100
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	107 Jenis		27 unit (100%)	27 Unit	27 Unit (100%)	100	27 Unit	27 Unit	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	556 Unit		278 unit (100%)	278 Unit	278 Unit (100%)		278 Unit	278 Unit	100
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 gedung (100%)	1.00 Unit	1.00 Unit (100%)	100	1 Unit	1 Unit	100
					BIDANG KP										
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)							280.624 Ha	280.624 Ha	100
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)							18.539,1 Ha	18539,1 Ha	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	201491,72			18.539 Ha (100%)	144633.74 Ha	144635.74 Ha (100%)	100	144633,73 Ha	0	0
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)								7 kasus	7 kasus	100
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi								245 Pelaku Usaha	0	0
3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan								2 Forum	0	0
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan								40 Dokumen	30 Dokumen	25,00
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha pelaku Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Dokumen				20 Dokumen	3 Dokumen (15%)	100	10 Pelaku Usaha	0	0

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Usaha pelaku pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	62 Dokumen			20 dokumen (100%)	30 Dokumen	23 dokumen (76,7 %)	100	20 Pelaku Usaha	0	0
					BIDANG TANGKAP											
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)								140.000 Ton	140.000 Ton	100
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan								3 Wilayah	2 Wilayah	25,00
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1q2wswsz	1 Dokumen			1 dokumen (100%)	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0	0
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					1545 Unit	3565 Unit (230,74%)		1760 Unit	0	0
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan								4 Wilayah	1 Wilayah	25,00
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen							1 Dokumen	0	25,00

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				40 Unit	262 Unit (655%)		1545 Unit	0	0
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan							170 Izin		
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil							100 persen	0	0
3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia			180 izin				1 Dokumen	0	0
					BIDANG BUDIDAYA										
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)							132.712,51 Ton	132.712,51 Ton	100
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan							5 Kawasan	3 Kawasan	25,00

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	180 Orang		115 orang (100%)	90 Orang	90 Orang (100%)	100	90 Orang	0	0
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	20 Dokumen		1 dokumen (100%)	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	100	10 Unit	0	0
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan							4 Kawasan	4 Kawasan	100
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit			10 Unit	10 Unit (100%)		88 Unit	0	0
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit			2 Unit	2 Unit (100%)		5 unit	0	0
					BIDANG P2HKP										
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)							29.845,28 Ton	29.845,28 Ton	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan												6 izin	6 izin	100
3	25	06	1.01	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	12											6 Dokumen	-	0
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan												4 Unit	3 Unit	25,00
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing												2 Kegiatan	-	0

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	8 Unit			3 Unit Usaha	3 Unit Usaha (100%)		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
					UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I										
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%	100%	100
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi							6 Jenis	3 Jenis	25,00
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		9 Paket (100%)	9 Paket	9 Paket (100%)	100	9 Paket	9 Paket	100
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		16 Paket (100%)	1 Paket	1 Paket (100%)	100	16 Paket	2 Paket	25,00
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		5 Paket(100%)	11 Paket	11 Paket(100%)	100	11 Paket	0 Paket	0
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77 Laporan		24 Laporan (100%)	1 laporan	1 laporan (100%)	100	31 Laporan	6 Laporan	25,00

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi						2 Jenis	2 Jenis	100	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 laporan (100%)	6 Laporan	6 Laporan (100%)	100	7 Laporan	7 Laporan	100
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara						3 Jenis	2 Jenis	25,00	
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		2 unit (100%)	3 Unit	3 Unit (100%)	100	2 Unit	2 Unit	100
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit		16 Unit (100%)	18 Unit	18 Unit (100%)	100	13 Unit	3 Unit	25,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)							7 kasus	7 kasus	100
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi							80 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	25,00
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Dokume		9 dokumen (100%)	9 Dokumen	7 Dokumen (77,78%)	100	5 Pelaku usaha	0	0

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Dokumen		55 dokumen (100%)	60 Dokumen	41 Dokumen (68,3%)	100	30 Pelaku usaha	10 Pelaku Usaha	25,00
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	4 Dokumen						8 Pelaku usaha	0 Pelaku Usaha	0
					UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II										
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%	100%	100
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)							6 Jenis	1 Jenis	25,00
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		6 Paket (100%)	9 Paket	9 Paket (100%)	100	6 Paket	5 Paket	25,00
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		5 paket (100%)	288 paket	276 paket (95,3%)	100	5 Paket	0 Paket	0
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		2 paket(100%)	3 Paket	3 Paket(100%)	100	2 Paket	0 Paket	0

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan		12 laporan (100%)	12 Laporan	12 Laporan (100%)	100	12 Laporan	0 Laporan	0
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi							2 Jenis	2 Jenis	100
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 laporan (100%)	4 Laporan	4 Laporan (100%)	100	5 Laporan	5 Laporan	100
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara							3 Unit	0 Unit	0
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 unit (100%)	2 Unit	2 Unit (100%)	100	2 Unit	0 Unit	0
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			13 Unit	12 Unit (92,30%)		3 unit	0 unit	0
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani							7 kasus	7 kasus	100
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi							80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Dokumen		3 dokumen (100%)	4 Dokumen	4 Dokumen (100%)	100	10 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	0
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Dokumen		15 Dokumen (100%)	5 Dokumen	5 Dokumen (100%)	100	180 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	0
					UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III										
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%	100%	100
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi							6 Jenis	6 Jenis	100
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		6 paket (100%)	5 Paket	5 Paket (100%)	100	6 Paket	3 Paket	25,00
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		5 paket(100%)	4 Paket	4 Paket(100%)	100	5 Paket	0	0

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		5 Paket (100%)	4 Paket	4 Paket (100%)	100	5 Paket	0	0
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		12 Laporan (100%)	8 Laporan	8 Laporan (100%)	100	10 Laporan	0	0
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan							2 Jenis	0 Jenis	0
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit		8 unit (100%)	7 Unit	7 Unit (100%)	100	8 Unit	0 unit	0
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi							3 Jenis	3 Jenis	100
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 laporan(100%)	7 Laporan	7 Laporan(100%)	100	8 Laporan	8 Laporan	100
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara							3 Jenis	0	0

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			3 Unit (100%)	2 Unit	2 Unit (100%)	100	1 Unit	0	0
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3Unit							3 Unit	0	0
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit				4 Unit	4 Unit (100%)		9 Unit	0	0
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)								7 kasus	7 kasus	100
3	25	05	1,01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi								85 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	100
3	25	05	1,01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Dokumen				30 Dokumen	8 Dokumen(26,7%)		8 Pelaku usaha	0	0

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	05	1,01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	12 Dokumen		55 dokumen (100%)	75 Dokumen	69 Dokumen (92%)	100	75 Pelaku usaha	0	0
3	25	05	1,01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	4 Dokumen						5 Pelaku usaha	0	0
					UPT. BUDIDAYA PERIKANAN										
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran							4 Jenis	4 Jenis	100
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi							6 Paket	6 Paket	100
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		6 Paket (100%)	8 Paket	8 Paket (100%)	100	6 Paket	6 Paket	100
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		5 Paket (100%)	3 Paket	3 Paket (100%)	100	6 Paket	6 Paket	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		4 paket (100%)	4 Paket	4 Paket (100%)	100	28 Laporan	5 Paket	25,00
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan		21 laporan (100%)	1 Laporan	1 Laporan (100%)	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi							18 Laporan	18 Laporan	100
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan		25 Laporan (100%)	25 Laporan	25 Laporan (100%)	100	3 Jenis	20 Laporan	25,00
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara							3 Jenis	3 Jenis	100
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		5 unit (100%)	2 Unit	2 Unit (100%)	100	15 Unit	3 unit	25,00
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit						15 unit	11 unit	25,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)							132712.51 Ton	132712.51 Ton	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan							5 Kawasan	3 Kawasan	25,00
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit		7 unit (100%)	10 Unit	10 Unit (100%)	100	8 unit	8 unit	100
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit		3 unit (100%)	2 Unit	2 Unit (100%)	100	5 Unit	0	0
					UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN										
3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran							100 Persen	100 Persen	0
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)							6 Jenis	6 Jenis	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		7 paket (100%)	5 Paket	5 Paket (100%)	100	5 Paket	4 Paket	25,00
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		4 paket (100%)	4 Paket	4 Paket (100%)	100	4 Paket	1 Paket	25,00
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		6 Laporan (100%)	1 Laporan	1 Laporan (100%)	100	4 Laporan	1 Laporan	25,00
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi							2 jenis	2 jenis	100
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan (100%)	10 Laporan	10 Laporan (100%)	100	10 Laporan	9 Laporan	25,00
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara							3 Jenis	3 Jenis	100
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 unit		3 Unit (100%)	3 Unit	3 Unit (100%)	100	3 Unit	3 Unit	100
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit						3 Unit	1 Unit	25,00

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit				9 Unit	9 Unit (100%)		9 Unit	0	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan								29.845,28 Ton	29.845,28 Ton	100
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan								5 Dokumen	3 Unit	25,00
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	15 Sampel				4 Unit Usaha	1 Unit usaha (25 %)		10 Kegiatan	3 Kegiatan	25,00
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN											
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran								100%	100%	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)							6 Jenis	6 Jenis	100
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 paket(100%)	9 Paket	9 Paket(100%)	100	6 Paket	6 Paket	100
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		2 Paket (100%)	1 Paket	1 Paket (100%)	100	1 Paket	1 Paket	100
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		3 paket (100%)	2 Paket	2 Paket (100%)	100	1 Paket	1 Paket	100
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan		29 laporan (100%)	1 Laporan	1 Laporan (100%)	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi							3 Jenis	3 Jenis	100
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan (100%)	1 Laporan	1 Laporan (100%)	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara							3 Jenis	3 Jenis	100

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit		2 unit (100%)	2 Unit	2 Unit (100%)	100	3 Unit	3 Unit	100
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit						5 Unit	5 Unit	100
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit						1 Unit	0 Unit	0
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)							140.000 Ton	140.000 Ton	100
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola							1 Unit	1 Unit	100
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit		4 unit (100%)	5 Unit	5 Unit (100%)	100	1 Unit	1 Unit	100

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target

Realisasi program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target capaian indikator yaitu :

1. SEKRETARIAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Pagu anggaran 23.729.500,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah Pagu anggaran 23.048.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu anggaran 90.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 Paket dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran 103.300.873,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 15 Paket dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pagu anggaran 25.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 11 Dokumen dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 1.007.523.998,- dan realisasi 405.115.876,- persentase 40,21 %. Sedangkan target kinerja 44 laporan dan realisasi 18 Laporan , dengan tingkat capaian kinerja 40,90%.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 139.257.000,- dan realisasi 0,-

persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 14 Unit dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 25.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 3 Unit dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 574.820.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Unit dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.

2. BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Pagu anggaran 144.627.500,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 144633,73 Ha, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah Pagu anggaran 9.791.850,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 Forum, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 15.250.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan

target kinerja 10 Pelaku Usaha, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya Pagu anggaran 28.675.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 20 Pelaku Usaha, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

3. BIDANG TANGKAP

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Pagu anggaran 95.147.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pagu anggaran 1.659.595.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1926 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Pagu anggaran 119.986.500,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pagu anggaran 68.815.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1545 Unit dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Pagu anggaran

41.515.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 100%, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Pagu anggaran 36.487.395,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

4. BIDANG BUDIDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pagu anggaran 29.097.114,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 90 Orang, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 57.283.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 10 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 1.033.720.815,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 88 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 535.288.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

5. BIDANG P2HKP

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Pagu anggaran 17.245.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 6 Dokumen, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Pagu anggaran 225.635.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 Kegiatan, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

6. UPT. WILAYAH I

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Pagu anggaran 1.385.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 11 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 4.020.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 pelaku usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Pagu anggaran 13.700.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 8 Pelaku Usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

7. UPT. WILAYAH II

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 22.967.544,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 6 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 8.832.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Pagu anggaran 3.011.670,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 43.350.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 12 Laporan, dan realisasi 0 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 75.381.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 19.510.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 3 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 23.840.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 10 pelaku usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 414.928.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 180 pelaku usaha, dan realisasi 0 pelaku usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

8. UPT. WILAYAH III

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 18.851.749,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan

target kinerja 6 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 3.860.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan Pagu anggaran 1.008.626,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 20.775.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 10 Laporan, dan realisasi 0 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 29.220.350,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 8 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 21.310.600,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 30.100.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 3 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 5.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 9 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 14.440.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 8 pelaku usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 341.94.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 75 pelaku usaha, dan realisasi 0 pelaku usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Pagu anggaran 15.220.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 Pelaku Usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

9. UPT BUDIDAYA PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 159.909.844,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 Unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .

10. UPT PMHP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran 1.081.760,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 4 Paket, dan realisasi 0 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 25.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 9 Unit, dan realisasi 0 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .

11. UPT PELABUHAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran 7.211.100,- dan realisasi 6.524.000,- persentase 90,47 %.

Sedangkan target kinerja 1 Paket, dan realisasi 1 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pagu anggaran 1.173.171.630,- dan realisasi 750.000,- persentase 0,06 %. Sedangkan target kinerja 1 Unit, dan realisasi 0 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang melebihi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada sampai dengan Trwulan II belum ada.

1. SEKRETARIAT

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu anggaran 60.519.000,- dan realisasi 10.80.000,- persentase 17,85 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu anggaran 24.112.804.879,- dan realisasi 16.786.792.509,- persentase 69,62 %. Sedangkan target kinerja 143 Orang dan realisasi 143 Orang, dengan tingkat capaian kinerja 50 %.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pagu anggaran 49.785.000,- dan realisasi 36.392.000,- persentase 73,10 %. Sedangkan target kinerja 14 Laporan dan realisasi 10 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 71,42 %.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pagu anggaran 39.595.000,- dan realisasi 7.784.000,- persentase 19,66 %. Sedangkan target kinerja 14 Laporan dan realisasi 3 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 21,42 %.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 200.000.000,- dan realisasi 197.858.610,- persentase 98,93 %. Sedangkan target kinerja 5 Paket dan realisasi 5 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 111.793.000,- dan realisasi 34.946.000,- persentase 31,26 %. Sedangkan target kinerja 5 Paket dan realisasi 2 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 40 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 541.328.000,- dan realisasi 50.163.542,- persentase 9,27 %. Sedangkan target kinerja 155 Paket dan realisasi 1 , dengan tingkat capaian kinerja 10%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu anggaran 1.769.992.995,- dan realisasi 871.943.375,- persentase 49,26 %. Sedangkan target kinerja 4 laporan dan realisasi 2 Laporan , dengan tingkat capaian kinerja 50%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 1.007.523.998,- dan realisasi 405.115.876,- persentase 40,21 %. Sedangkan target kinerja 44 laporan dan realisasi 18 Laporan , dengan tingkat capaian kinerja 40,90%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 355.966.295,- dan realisasi 138.833.784,- persentase 39,00 %. Sedangkan target kinerja 27 Unit dan realisasi 11 Unit , dengan tingkat capaian kinerja 40,00%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 153.000.000,- dan realisasi 87.540.000,- persentase 57,22 %. Sedangkan target kinerja 278 Unit dan realisasi 159 Unit , dengan tingkat capaian kinerja 57,19%.

2. BIDANG P2HKP

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Pagu anggaran 17.985.000,- dan realisasi 5.084.000,- persentase 28,27 %. Sedangkan target kinerja 1 Kegiatan, dan realisasi 1 Kegiatan, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.

3. UPT. WILAYAH I

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 4.421.591,- dan realisasi 4.401.000,- persentase 99,53 %. Sedangkan target kinerja 9 paket, dan realisasi 9 paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 5.008.000,- dan realisasi 1.334.000,- persentase 22,64 %. Sedangkan target kinerja 16 paket, dan realisasi 4 paket, dengan tingkat capaian kinerja 25 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 38.940.000,- dan realisasi 11.510.000,- persentase 29,56 %. Sedangkan target kinerja 31 Laporan, dan realisasi 9 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 29 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 176.347.160,- dan realisasi 80.130.380,- persentase 45,44 %. Sedangkan target kinerja 7 Laporan, dan realisasi 3 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 43 %.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 15.332.300,- dan realisasi 3.350.192,- persentase 21,85 %. Sedangkan target kinerja 2 unit, dan realisasi 1 unit, dengan tingkat capaian kinerja 50 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 6.220.000,- dan realisasi 1.450.000,- persentase 23,31 %. Sedangkan target kinerja 13 unit, dan realisasi 3 unit, dengan tingkat capaian kinerja 23,07 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 190.942.375,- dan realisasi 27.380.000,- persentase 14.34 %. Sedangkan target kinerja 30 pelaku usaha, dan realisasi 4 pelaku usaha, dengan tingkat capaian kinerja 13,33 %.

4. UPT. WILAYAH II

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 203.694.040,- dan realisasi 101.344.500,- persentase 49.75 %. Sedangkan target kinerja 5 Laporan, dan realisasi 2 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 40.00 %.

5. UPT. WILAYAH III

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 214.515.031,- dan realisasi 95.814.620,- persentase 44.67 %. Sedangkan target kinerja 8 Laporan, dan realisasi 3 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 43 %.

6. UPT BUDIDAYA PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 82.491.997,- dan realisasi 11.707.885,- persentase 14,19 %. Sedangkan target kinerja 6 paket, dan realisasi 1 paket, dengan tingkat capaian kinerja 16,6 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 7.480.000,- dan realisasi 3.790.000,- persentase 50,67 %. Sedangkan target kinerja 6 paket, dan realisasi 3 paket, dengan tingkat capaian kinerja 50 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu anggaran 7.846.317,- dan realisasi 1.316.000,- persentase 16,77 %. Sedangkan target kinerja 28 Laporan, dan realisasi 5 laporan, dengan tingkat capaian kinerja 17 % .
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 42.201.875,- dan realisasi 13.483.000,- persentase 31,95 %. Sedangkan target kinerja 1 Jenis, dan realisasi 1 Jenis, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 981.308.480,- dan realisasi 475.521.185,- persentase 48,46 %. Sedangkan target kinerja 3 Jenis, dan realisasi 2 Jenis, dengan tingkat capaian kinerja 66 % .

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 107.265.320,- dan realisasi 21.453.400,- persentase 20 %. Sedangkan target kinerja 15 Unit, dan realisasi 3 unit, dengan tingkat capaian kinerja 20 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 35.510.000,- dan realisasi 3.950.000,- persentase 11,12 %. Sedangkan target kinerja 15 Unit, dan realisasi 2 unit, dengan tingkat capaian kinerja 13,33 % .

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 2.110.242.590,- dan realisasi 28.275.500,- persentase 1,34 %. Sedangkan target kinerja 8 Unit, dan realisasi 1 unit, dengan tingkat capaian kinerja 12,5 % .

12. UPT PMHP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 5.424.707,- dan realisasi 1.251.200,- persentase 23,06 %. Sedangkan target kinerja 5 Paket, dan realisasi 1 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 20 % .
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 13.950.000,- dan realisasi 5.165.000,- persentase 37,03 %. Sedangkan target kinerja 4 Laporan, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 25 % .

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 233.976.688,- dan realisasi 130.259.624,- persentase 55,67 %. Sedangkan target kinerja 10 Laporan, dan realisasi 5 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 50 % .

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu

anggaran 21.023.838,- dan realisasi 7.663.000,- persentase 36,45 %. Sedangkan target kinerja 3 Unit, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 33,33 % .

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 13.150.000,- dan realisasi 2.850.000,- persentase 21,67 %. Sedangkan target kinerja 3 Unit, dan realisasi 1 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 33,33 % .

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Pagu anggaran 165.734.419,- dan realisasi 5.552.000,- persentase 3,35 %. Sedangkan target kinerja 10 Kegiatan, dan realisasi 1 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 10 % .

13. UPT PELABUHAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 14.270.290,- dan realisasi 14.185.400,- persentase 99,41 %. Sedangkan target kinerja 6 Paket, dan realisasi 6 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 5.600.000,- dan realisasi 4.318.242,- persentase 77,11 %. Sedangkan target kinerja 1 Paket, dan realisasi 1 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 45.247.500,- dan realisasi 17.740.000,- persentase 39,21 %. Sedangkan target kinerja 1 Laporan, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 432.852.800,- dan realisasi 215.356.680,- persentase 49,75 %. Sedangkan target kinerja 1 Laporan, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 50 % .

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 73.440.000,- dan realisasi 22.005.230,- persentase 29,96%.

Sedangkan target kinerja 3 Unit, dan realisasi 1 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 33,33 % .

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 147.850.000,- dan realisasi 80.424.055,- persentase 54,40 %. Sedangkan target kinerja 5 Unit, dan realisasi 3 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 60 % .

2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan dikarenakan terjadi efisiensi anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 di setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025, sesuai surat Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Ketua TAPD No. 900.1.1/BPKAD/798 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Pelaksanaan Belanja APBD TA. 2025.

2.1.4. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah secara teknis memiliki pengaruh besar, karena produksi perikanan bukan hanya pada kegiatan perikanan tangkap, namun juga pada perikanan budidaya dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, secara teknis mengalami pengaruh, disebabkan produksi olahan perikanan di Provinsi Riau, di dukung oleh Unit Pengolahan Perikanan skala kecil.

2.1.5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Di Ambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut

Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Di Ambil Untuk Mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu dengan tersedianya anggaran yang cukup sesuai perencanaan yang sudah disusun dan dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Kas yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 sampai pada Triwulan Ke II. dengan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase sebagaimana disusun pada Tabel 2.2 (TC-30).

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.30)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasai Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3		4		5		6		7
1.	NTN	111	112	113	105,67	105,18	105,67	105,67	106	
2.	NTPi	111	112	113	101,57	101,37	101,57	101,57	106	
3.	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	284.974,86	296.394,57	308.327,84	272.712,51	286.232,22	61.665,60	272.712,51	274.879,63	
	- Jumlah produksi perikanan Budidaya (Ton)	121.485,31	126.344,73	131.389,52	140.000,00	124.733,54	30.359,25	140.000,00	134.039,63	
	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	147.176,78	152.105,79	157.199,87	132.712,51	135.773,42	31.306,35	132.712,51	140.840,00	
	- Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	16.312,77	17.944,05	19.738,45	29.845,28	25.725,26	4.184,99	29845,28	30.714,56	
4.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	79,04	82,2	85,48	89,9	87,59	-	89,9	91	
5.	Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	18	20	22	22	22,74	-	22	23	

Keterangan: * Realisasi Tahun 2025 Sampai Triwulan II

Berdasarkan Tabel 2.2 (T-C 30) Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:

1.2.1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan. NTN sampai Triwulan II adalah 105,67 % dari target 105,67 %.

2.2.2. Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)

NTPi adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nilai tukar pembudidaya ikan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan pembudidaya ikan adalah jumlah hasil yang diterima oleh pembudidaya. NTPi Tahun 2025 memiliki target 101,57 % dan realisasi 101,57 % pada Triwulan II, dari capaian tersebut dapat di gambarkan bahwa nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada sepanjang Triwulan II.

2.2.3. Meningkatnya Produksi Perikanan

Untuk jumlah produksi perikanan dan kelautan ini merupakan akumulasi dari produksi perikanan budidaya dan hasil tangkapan, dimana capaian jumlah produksi perikanan dan kelautan Tahun 2025 sampai Triwulan II adalah 61.665,60 ton dari target sebesar 272.712,51 Ton.

- Produksi Perikanan Budidaya

Untuk jumlah produksi perikanan budidaya, capaian jumlah produksi Tahun 2025 sebesar 31.306,35 Ton dari target sebesar 132.712,51 Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Budidaya :

1. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri.
2. Pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri
3. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam daerah sesuai standar.
4. Pengembangan perikanan budidaya secara intensif dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
6. Peningkatan daya saing produk perikanan budidaya melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga proses budidaya dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
7. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien dan modern.

8. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung.

- Produksi Perikanan Tangkap

Penurunan produksi tangkap membutuhkan adanya evaluasi dan kajian terhadap potensi yang ada sehingga penetapan kebijakan pengembangan dapat ditetapkan berdasarkan daya dukung sumber daya perikanan tangkap. Indikator jumlah produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari produksi yang didaratkan nelayan perikanan dan hasil estimasi yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap. Untuk jumlah produksi perikanan tangkap, capaian jumlah produksi tangkap Tahun 2025 sebesar sebesar 30.328,92 ton dari target 140.000,00 ton. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Penangkapan, seperti Penerbitan Izin Usaha Penangkapan ikan sebanyak 170 rekomendasi izin. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target perikanan tangkap:

1. Kegiatan Pengembangan Usaha perikanan tangkap,
2. Pembinaan terhadap kelompok nelayan tangkap, dan pengawasan penangkapan ikan.
3. Pemberian bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

- Produksi Perikanan Pengolahan

Produksi pengolahan perikanan adalah Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan. Untuk jumlah produksi perikanan pengolahan, capaian jumlah produksi pengolahan Tahun 2025 sebesar 4.184,99 ton dari target 29.845,28 ton. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target pembinaan untuk unit pengolahan perikanan skala kecil dari anggaran Dekonsentrasi. Beberapa persoalan yang ada berupa terbatasnya modal usaha yang dimiliki, terbatasnya persediaan produk olahan karena dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dan modal, tenaga kerja yang kurang mencukupi dalam membantu proses produksi, keterbatasan dalam pemasaran produk serta proses pengolahan yang masih belum bersertifikat.

2.2.4. Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan

Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Tahun 2025. memiliki target 89,9 % dan realisasi sampai pada Triwulan II adalah 0%. Di sebabkan efisiensi anggaran Progrm/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

2.2.5. Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Tahun 2025 memiliki target 22 % dan realisasi sampai Triwulan II adalah 0 %. Di sebabkan efisiensi

anggaran Progm/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah:

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mendukung dalam pencapaian misi yang yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah Peningkatan produktivitas komoditas perikanan diharapkan mampu untuk menaikkan daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Provinsi Riau, Dalam hal mendukung pencapaian misi Kepala Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 2 (dua) program unggulan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Penilaian Visi Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, NSPK, SPM dan SDGs

Identifikasi tentang perananan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan

terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang sangat terkait langsung dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

MISI 3: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing

Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan tujuan yaitu Meningkatnya produksi perikanan.

Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung capaian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia yaitu:

- Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
 - Point 14.5 Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut adalah Target Tahun 2022 adalah 5 Ha dan realisasi 280.499,Ha, hal ini telah di tetapkannya Kawasan Konservasi Perairan di Perairan Kepulauan Aruah dengan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 73 Tahun 2021 dengan luasan 18.536,10 Ha, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 Tahun 2023 dengan Luasan 126.097,64 Ha, Pencadangan Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terubuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 dengan luasan 40.816 Ha, Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Rupat Utara dengan SK Gubernur Nomor Kpts. 565/II/2019 dengan luasan 15.547 Ha. Sedangkan untuk capaian nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha) dengan target 28,9 Juta Ha dengan capaian 28,9 Juta Ha.
 - Point 14.6 Persentase kepatuhan pelaku usaha, pada Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan menargetkan 90% capaian 87,59%, sedangkan untuk nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%) target 96 % dan capaian 96,56 %.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:

Tantangan meliputi :

- Sumberdaya Ikan yang semakin terbatas pada zona penangkapan dibawah 4 mil,
- IUU Fishing (Illegal, unreported, unregulated) diantaranya Pelaku usaha melakukan operasional penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen perizinan,
- Ketimpangan Pemanfaatan : Konflik Antar Wilayah Nelayan, Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan.
- Kebiasaan nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara one day trip / one day fishing.
- Harga pakan ikan relatif mahal sementara 70 persen ongkos produksi untuk pembelian pakan ikan.
- Sebagian besar usaha perikanan budidaya masih di skala usaha mikro kecil
- Keterbatasan kewenangan yang tercantum pada permendagri no. 90 tahun 2019 bahwa pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)/UMKM yang berskala menengah dan besar.
- belum optimalnya peningkatan kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan baku bagi usaha pengolahan ikan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya promosi hasil usaha pengolahan unit pengolahan ikan.
- Adanya Kewenangan Pengelolaan Ruang Laut 0-12 Mil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Masih sering terjadi konflik sosial baik yang melibatkan sesama nelayan dalam satu Kabupaten maupun antar Kabupaten.

Peluang meliputi :

- Tersedianya SDM sektor Perikanan Tangkap cukup banyak dan terampil serta membuka lapangan kerja baru dengan jumlah nelayan 57.607 orang nelayan.
- Sumber daya ikan masih tersedia di WPP 711 (Laut China Selatan dengan potensi lestari 767.126 Ton) dan WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman dengan potensi lestari 425.444 Ton).
- Potensi Perikanan Budidaya yang sangat besar 237.639,37 ha terdiri dari perikanan air tawar 57.340,12 ha, air laut 149.030,68 ha dan air payau 31.268,57 ha.
- Adanya kampung kakap putih (Kab. Kep. Meranti) dan kampung patin (Kab. Kampar) di Riau.
- Dukungan pemerintah bagi kemudahan birokrasi perizinan pengolahan perikanan
- Adanya Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri dan telah dicadangkan oleh gubernur.

- Kebutuhan Benur Udang Vaname di Provinsi Riau mencapai 2,3 milyar ekor/tahun
- Jumlah pelaku usaha pembenihan rakyat (UPR) ikan air tawar cukup tinggi di Provinsi Riau.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang di Rencanakan

Isu-Isu Penting Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pokok diantaranya adalah kemiskinan nelayan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta keterbatasan sarana dan prasarana.
- b. Terjadinya inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi.
- c. Masih rendahnya nilai tambah budidaya perikanan karena sebagian besar masih dijual berupa ikan segar, belum berupa hasil industri sebagaimana yang kita harapkan.
- d. Masih terjadi *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan pukat harimau (Trawl), cantrang, dan lampara yang berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan dan penurunan stok ikan.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

2.4.1. Proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

Perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan adalah pada rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan program dan kegiatan berasal dari turunan dari pembahasan dan kebutuhan. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam perencanaan dan penganggaran. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan adanya pengurangan pagu indikatif yaitu dari Rancangan Perubahan RKPD sebesar Rp. 75.063.762.957,- dan pagu indikatif kebutuhan sebesar Rp. 41.669.767.930,-, terjadi penurunan di karenakan untuk pengurangan anggaran terhadap kebutuhan Perencanaan Pelabuhan Bagan Siapi-api dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025.

2.4.2. Uraian tentang alasan perbandingan tersebut dilakukan

Uraian perbandingan perlu dilaksanakan disebabkan yaitu untuk mempedomani penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, menyelaraskan prioritas pembangunan, menyusun rancangan kebijakan umum anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai bahan sinkronisasi penyusunan perubahan Tahun 2025 dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.3. Penjelasan Tentang Temuan Dan Catatan Penting Jika Terdapat Perbedaan Dengan Rancangan Awal RKPD Seperti Rumusan Program/Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan RKPD Termasuk Perbedaan Besaran Anggaran Dan Kinerja.

Terdapat catatan penting dalam perbedaan Perubahan RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 yaitu perbedaan besaran Pengurangan dana tersebut di karenakan efisiensi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

2.4.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun yang direncanakan

Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2025 dan sesuai dengan realisasi anggaran yang tercapai review tersebut dapat dilihat, bahwa perbandingan antara rancangan Perubahan 2025 dengan analisis kebutuhan adanya pengurangan/efisiensi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan pengurangan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.3. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
(Tabel T-C.31)

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capain	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SEKRETARIAT					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SEKRETARIAT					
									30.101.235.944						
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	30.101.235.944	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen		
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	202.416.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	102.416.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	21.600.000,-	Honor Pendampingan Pembentukan Kelembagaan UPT Rohil, Sudah Cair 10.800.000. dan akan di cairkan honor narasumber pembahasan dengan Kemendagri
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	
3	25	02	1.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	-	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	24.112.804.879	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	30.691.566.886,-	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	24.112.804.879	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201 Orang	30.691.566.886,-	Penambahan pagu untuk TPP 1.269.588.381
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola	1 Laporan	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola	0 Laporan	-	
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan	70.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan	49.785.000,-	Penilaian BMD di Dumai, Rohil, Kepulauan Meranti, Kantor Dinas dan Balai Benih sudah dilaksanakan, tinggal cetak laporan Penilaian yang belum cair Rp. 225.000
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	80.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	17.815.000,-	Penatausahaan BMD di Kepulauan Meranti dan Rohil sudah dilaksanakan realisasinya Rp. 13.352.750
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	1.772.831.673	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	757.761.088,-	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,-	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, Kertas, Benda Pos, dan Bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	235.002.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.793.000,-	Pembayaran Makan minum Rapat Tamu Undangan
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	103.300.873	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	103.300.873,-	Pembayaran belanja Cetak dengan no kontrak 100.3.7.1/DKP-Sekr/SPK/V/2025/60.07.59 Tanggal 28 Mei 2025
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	1.094.528.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	396.667.215,-	Pembayaran rakor memenuhi undangan acara kementerian
3	25	02	1.07	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	2.618.902.972,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	2.800.695.403,-	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.769.992.995	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.889.992.995,-	Terjadi pluktuasi peningkatan pembayaran tagihan Listrik di UPT.Pelabuhan Dumai, dan sudah di sampaikan pengaduan komplain pada PLN.sekor Dumai
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	848.909.977	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	910.702.408,-	Pembayaran Honor THL sampai bulan Oktober, Security dan CS sampai bulan Desember
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	2 Jenis	160.494.125	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	2 Jenis	164.257.000,-	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	daerah yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	135.494.125	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	daerah yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	139.257.000,-	Tunda Bayar T.A. 2025 atas Pengadaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Modal Mebel, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Personal Computer dengan nilai realisasi Rp. 139.257.000
3	25	02	1.08	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000,-	Pembelian Gorden
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	27 Jenis	1.083.786.295	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	27 Jenis	997.907.269,-	
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	355.966.295	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	355.966.295,-	BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 Unit	153.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 Unit	122.600.000,-	Pemeliharaan AC, Alat Komputer dan printer, dan lainnya
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	574.820.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	519.340.974,-	Tunda Bayar - Pembayaran Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor Lantai I Rp 42.013.500 - Pemeliharaan Gedung Kantor Lantai I Rp. 417.123.599,7 - Retensi 5% atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Lantai I Rp. 21.953.874 - konsultan Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Lantai I Rp. 38.250.000
					Bidang KP	-			1.661.386.297	Bidang KP	-				
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pekanbaru	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	280.624	1.067.626.298,00	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pekanbaru	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	280.624		
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pekanbaru	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan	18.539,1 Ha		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pekanbaru	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas	18.539,1 Ha		

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

							Gas Bumi yang dikelola (Ha)					Bumi yang dikelola (Ha)			
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Provinsi Riau	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	144633,73 Ha	1.067.626.298	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Provinsi Riau	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	0 Ha	6.766.000,-	Realisasi SPJ ke Jakarta dalam rangka Mengadakan konsultasi teknis kawasan konservasi di Provinsi Riau serta mendampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam acara audiensi Gubernur Riau dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan nilai realisasi Rp. 6.392.337
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus	593.759.999	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus	0	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	245 Pelaku Usaha	20.000.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	0	0	
3	25	05	1.02	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	2 Forum	20.000.000	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	0	0	
3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	40 Dokumen	99.999.999	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	30 Dokumen		
3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Usaha pelaku pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	39.999.999	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Usaha pelaku Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0	0	
3	25	05	102	0005	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Riau	Jumlah usaha pelaku Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diriksa memenuhinya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Riau	Jumlah usaha pelaku Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diriksa memenuhinya sesuai kewenangan provinsi	0	0	
3	25	05	102	0006	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Riau	Jumlah Usaha pelaku pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	60.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai	Provinsi Riau	Jumlah Usaha pelaku pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku Usaha	0	

									dengan Kewenangannya						
					BIDANG TANGKAP	-		3.348.789.609	BIDANG TANGKAP	-					
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	140.000 Ton	3.348.789.609	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	140.000 Ton	0	
3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	3 Wilayah	1.681.342.865,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	2 Wilayah	1.635.625.000,-	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	174.710.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen	0	
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rokan Hilir,Kep.Meranti,Indragiri Hilir,Bengkalis ,Dumai,Siak, Pelalawan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1926 Unit	1.506.632.865	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rokan Hilir,Kep.Meranti,Indragiri Hilir,Bengkalis ,Dumai,Siak, Pelalawan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Unit	1.635.625.000,-	Pembayaran Pekerjaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 (T.A. 2025) Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dana yang dibutuhkan : Rp. 1.635.625.000 dengan Rincian : 1. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Kabupaten Bengkalis pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (1 Kegiatan Rp. 1.102.425.000) 2. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Perikanan pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (1 Kegiatan Rp. 533.200.000)
3	25	03	102		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas		Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan	4 Wilayah	1.506.759.500,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas		Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan	4 Wilayah	0	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
3	25	03	102	0001											
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	216.265.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	0	
3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pekanbaru, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1545 Unit	1.290.494.500	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pekanbaru, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Unit	0	
3	25	03	103		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	170 Izin	160.687.244,00	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	170 Izin		
3	25	03	103	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Provinsi Riau	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 persen	91.462.454	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Provinsi Riau	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	0 persen	0	
3	25	03	103	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Riau	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	69.224.790	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Riau	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	0 Dokumen		
					BIDANG BUDIDAYA				1.846.246.190	BIDANG BUDIDAYA					
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provinsi Riau	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)		1.846.246.190	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provinsi Riau	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)			
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan		167.674.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan			
3	25	04	105	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kep.Meranti dan Bengkalis	Jumlah Pembudidayaan	90 Orang	66.011.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kep.Meranti dan Bengkalis	Jumlah Pembudidayaan	0 Orang	0	dilakukan rasionalisasi anggaran dikarenakan kekurangan anggaran untuk kegiatan yang prioritas
3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kep.Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Inhil, Pelalawan, Kota Dumai	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	10 Unit	101.663.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kep.Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Inhil, Pelalawan, Kota Dumai	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	0 Unit	0	dilakukan rasionalisasi anggaran dikarenakan kekurangan anggaran untuk kegiatan yang prioritas
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya	4 Kawasan	1.678.572.190	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang	4 Kawasan		

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

							ikan diperaikan darat yang dimanfaatkan				dimanfaatkan				
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hulu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88 Unit	1.074.730.085	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hulu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0	dilakukan rasionalisasi anggaran dikarenakan kekurangan anggaran untuk kegiatan yang prioritas
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kab.kampar	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	603.842.105	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kab.kampar	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0	dilakukan rasionalisasi anggaran dikarenakan kekurangan anggaran untuk kegiatan yang prioritas
					Bidang P2HKP				524.796.621	Bidang P2HKP					
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)		524.796.621	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)			
3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan	6 izin	35.250.000	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan	6 izin		
3	25	06	101	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	6 Dokumen	35.250.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	0 Dokumen	0	Adanya Efisiensi Anggaran
3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	4 Unit	489.546.621	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	3 Unit	5.820.000,-	
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Siak	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan	453.876.621	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Siak	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0 Kegiatan	0	Adanya Efisiensi Anggaran
3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kab. Bengkalis dan Kab. Rokan Hilir	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan	1 Kegiatan	35.670.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kab. Bengkalis dan Kab. Rokan Hilir	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	1 Kegiatan	5.820.000,-	Realisasi Perjalanan dinas dalam rangka Pra Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ke Kab/Kota ke Kabupaten Bengkalis dan Adanya Efisiensi Anggaran

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

					sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	dan Pelalawan	Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	dan Pelalawan	Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku usaha	220.372.375	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	39.250.000,00	Realisasi SPJ
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku usaha	27.400.000	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku Usaha	-	
					UP.PSDKP WIL 2	-			986.914.967	UP.PSDKP WIL 2	-				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	447.366.967,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	156.322.427	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	1 Jenis	9.639.400,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	45.935.087	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.639.400,00	Untuk Pembayaran Belanja Perlengkapan Kantor Sesuai Nota Bon Tanggal 02 Juni 2025
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.664.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.023.340	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	-	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	-	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	196.153.540	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	182.264.880,00	2 Jenis
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	196.153.540	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	182.264.880,00	5 Laporan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Unit	94.891.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	0 Unit	-	0 Unit
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.381.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	-	0 Unit

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	19.510.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	-	0 unit
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 kasus	539.548.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 kasus		
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			80 Pelaku Usaha	539.548.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			80 Pelaku Usaha	-	
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku usaha	47.790.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku usaha	-	
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	180 Pelaku usaha	491.758.000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku usaha	-	
					UPT.PSDKP WIL 3				802.368.302	UPT.PSDKP WIL 3					
3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	354.848.302,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	71.701.896	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	7.422.160,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.357.774	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.422.160,00	Realisasi SPJ
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.728.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	-	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.031.122	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	-	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	41.585.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	-	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	29.220.350	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	0 Jenis	-	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	29.220.350	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	197.515.456	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	200.120.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	8 Laporan	197.515.456	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	8 Laporan	200.120.000,00	Pembayaran Honor

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
3	25	01	1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	56.410.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	0	-		
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		21.310.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	-	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		30.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus		447.520.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus			
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	85 Pelaku Usaha		447.520.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	85 Pelaku Usaha	35.125.000,00		
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku usaha		30.000.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0	-	
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	75 Pelaku usaha		387.520.000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0	35.125.000,00	Tunda Bayar Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Bakar Minyak Non Subsidi TA. 2025
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku usaha		30.000.000	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0	-	
					UPT.Budidaya Perikanan	-				5.462.374.501	UPT.Budidaya Perikanan	-				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis		1.310.876.939,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Paket		158.293.139	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Paket	76.791.864,00		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		55.905.744	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	53.347.047,00	- Tunda bayar (Rp. 30,987,628) - Rincian Kegiatan : meja kerja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.387.395	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.790.000,00	SUDAH SPJ SEMUA
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 Laporan	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1.367.317,00	- Rincian kegiatan : spanduk dan laporan akhir kegiatan
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	78.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18.287.500,00	- Rincian kegiatan : 2 orang ke BBIP RUPAT (SUDAH BERANGKAT)
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		982.308.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	18 Laporan	853.088.480,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		982.308.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	853.088.480,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		170.275.320	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	44.461.200,00	
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		107.265.320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	27.651.200	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		63.010.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	16.810.000,00	- Rician kegiatan : service AC service kincir, servis genset , dan servis mesin potong rumput.
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	18 Laporan	4.151.497.562	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	132712.51 Ton		
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	3 Jenis	4.151.497.562	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	3 Kawasan	791.059.525,00	
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Jenis	1.241.518.880	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	785.465.625,00	- Tunda Bayar : 376.542,875 - Rincian kegiatan : - Artemia - Pakan induk ikan - BBM Operasional - Baju Lapangan - Topi Lapangan - Round Up - Tali Senar Potong Rumput - Hapa - Sepatu Boot - Garam - Troli
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	2.909.978.682	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	5.593.900,00	Pembayaran Retensi 5 % Pembuatan saluran air / parit di BBIS Sei Tibun (56 m) TA. 2017 Berdasarkan Surat dari CV Tiga Bintang dengan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10 Kegiatan	188.493.419	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	7.052.000,00	sisa dana 1,500,000 digunakan untuk pengujian panelis standar
					UPT.PELABUHAN PERIKANAN	-			29.322.798.016	UPT.PELABUHAN PERIKANAN	-				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	782.015.814,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	127.873.014	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	55.861.390,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	16.167.314	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.270.290,00	Realisasi SPJ
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.400.000,00	Realisasi SPJ
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.505.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.211.100,00	Realisasi SPJ
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	91.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.980.000,00	Realisasi SPJ
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	432.852.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	408.852.800,00	
3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	432.852.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	408.852.800,00	Pembayaran Honor sampai dengan Bulan Desember
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	221.290.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	185.902.500,00	
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	73.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	72.152.500,00	Realisasi SPJ
3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	147.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	113.750.000,00	Realisasi SPJ
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

						Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi					
3	25	03				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		140.000 Ton	28.540.782.202	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	140.000 Ton			
3	25	03	106			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kota Dumai	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1 Unit	28.540.782.202	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kota Dumai	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1 Unit	1.173.171.630,00	
3	25	03	106	0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	28.540.782.202	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	1.173.171.630,00	Belanja Natura dan Pakan-Natura (Garam) : Rp 200.000.000,- (APBD 2025) TUNDA BAYAR : 1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape (Rp 99.101.355,-) 2. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es (Rp 29.859.000,-) 3. Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran (Rp 30.000.000,-) 4. Belanja Modal Jalan Lainnya (Rp 89.959.950,-) 5. Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal (Rp 624.553.900,92) 6. Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai (Rp 50.821.350,-) 7. Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku (Rp 48.876.075,-)
						JUMLAH				75.063.762.957,-					41.715.138.930,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Uraian tentang proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Usulan masyarakat diajukan langsung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan usulan masyarakat melalui proposal tertulis yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan dan juga oleh masyarakat itu sendiri, selanjutnya Berdasarkan Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat yang terkait melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan.

Dalam prosesnya Forum Perangkat Daerah, dengan mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Sesuai dengan program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang telah diselaraskan dengan usulan prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Ini merupakan langkah awal untuk usulan kegiatan tahun 2025 Kab/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan. Maka dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dibentuk suatu tim untuk penyaringan usulan – usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota dirangkum dalam Berita Acara dan disepakati dalam hasil Forum Perangkat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota Provinsi Riau prgram / kegiatan tahun 2025.

Dalam perubahan RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat yang terkait melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan.

2.5.2. Uraian tentang kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Pada prinsipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan dikelompokkan kedalam kewenangan lalu disusun berdasarkan skala prioritas dengan melakukan peninjauan kelapangan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau sudah memiliki data dukung lalu dimasukkan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Riau. Adapun Program / Kegiatan yang prioritas yaitu :

1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya
3. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Usulan yang disampaikan oleh kelompok dan anggota masyarakat pemangku kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 yang akan dituangkan dalam Tabel 2.5 TC. 32 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (TC. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	BIDANG PERIKANAN TANGKAP				
	PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN TANGKAP				
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan		
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		
		Bengkalis			
		Dusun Tua Meskom RT.001 RW.004 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Peralatan untuk Perlengkapan Nelayan Jaring Insang 2 Inchi	330 Unit	
		Jl. Dusun Simpang Merpati RT.001 RT,002 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (<i>Gillnet</i> terakit beserta komponen)	450 Unit	
		Jl. Antelas Dusun Pembangunan RT.002 RW,001 Desa Senderak Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Jaring Udang/ <i>Trammel Net</i>)	250 Unit	
		Jl. Gebat Putra RT.005 RW.003 Desa Senderak Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Pengerih)	100 Unit	
		Jl. Dusun Simpang Merpati RT.002 RT,002 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Kapal Motor Kayu 5 GT beserta mesin Mitsubishi 4D)	5 Unit	
		SIAK			

		Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring	100 Unit	
		Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit	Bantuan Sarana Alat Tangkap Gombang	20 Unit	
		INDRAGIRI HILIR			
		Parit Simpang RT. 002 Rw. 004 Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	200 Piece	
		Desa Perigi Raja Kecamatan Kuala Indragiri	Bantuan Sarana Alat Tangkap Kapal Motor Fiber 1 GT lengkap dengan mesin	3 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring	150 Piece	
		Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri	Bantuan Sarana Alat Tangkap Kapal Motor Fiber 1 GT lengkap dengan mesin	5 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring	100 Piece	
		Jl. H. Ahmad Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Teritip Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	100 Piece	
		Kelurahan Tagaraja Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	200 Piece	
		Jl. Tunas Kelapa RT. 004 RW. 004 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 2 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	100 Piece	
		Bakau Lurus RT. 001 RW. 005 Desa Sungai Teritip Kec. Kateman	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	10 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	200 Piece	
		Desa Lahang Tengah Kec. Gaung	Bantuan Sarana Alat Tangkap Pompong 1 GT lengkap dengan mesin	5 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring 2 Inchi	100 Piece	
		Desa Terusan Kempas Kec. Gaung	Bantuan Sarana Alat Tangkap Sampan Motor 1 GT	20 Unit	
			Bantuan Sarana Alat Tangkap Daging Belat	20 Unit	
		KEPULAUAN MERANTI			
		Desa Kedabu Rapt Kec. Rangsang Pesisir	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece	

		Desa Melai Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Udang	150 piece		
		Desa Tanjung Kedabu, Kec. Rangsang Pesisir	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	200 piece		
		Desa Anak Setatah Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece		
		Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece		
		Desa Bantar Kec. Rangsang Barat	Bantuan Saana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	150 piece		
		Desa Centai Kec. Pulau Merbau	Bantuan Saana Alat Tangkap Jaring Tangsi (0,30 mm)	200 piece		
		PELALAWAN				
		Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit		
		Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	20 Unit		
		Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	50 Unit		
		Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2,5 Inchi)	50 Unit		
		ROHIL				

		Jl. Sungai Gajah RT 013 / RW 006 Dusun Jaya Kep. Sungai Segajah Jaya, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir	Bantuan 3 Unit Bod Nelayan	3 Unit	
		Kepenghuluhan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir	Bantuan Mesin 24 HP Lengkap	10 Unit	
		Jl. Kampung Baru Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko	Bantuan Mesin Kapal 30 HP	10 Unit	
		Jl. Baris RT.011 Kep. Sinaboi	Bantuan Mesin Diesel 28 HP	10 Unit	
		Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas	Bantuan Alat Tangkap Nelayan	10 Unit	
		Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	Bantuan Jaring Penangkapan Ikan	10 Unit	
		Jl. Garuda Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas	Bantuan Kapal Kualuh & Alat Tangkap	10 Unit	
		DUMAI			
			Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	23 Paket	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan		
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		
		SIAK			
		Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	18 Unit	
		INDRAGIRI HULU			
		Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	

		Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Jaring Insang mesh size 4-5 Inchi	48 Unit	
		Desa Sukajadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Jala Tebar spesifikasi :Bahan Benang Panjang 3 Meter Lebar 6 meter Mesh size 3/4 inci Ukuran Benang No. 9	16 Unit	
		Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Jala Tebar spesifikasi : Bahan Benang Panjang 3 Meter Lebar 6 meter Mesh size 3/4 inci Ukuran Benang No. 9	12 Unit	
		KEPULAUAN MERANTI			
		Desa Tanjung Kedabu, Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
		Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (2 GT)	2 Unit	
		Desa Baran Melintang Kec. Pulau Merbau	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (2 GT)	2 Unit	
		Desa Tanah Merah Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
		Desa Centai Kec. Pulau Merbau	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
		Desa Kedabu Rapt Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Kapal Motor Fiberglass (3,5 GT)	2 Unit	
		PELALAWAN			
		Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
		Desa Pkl. Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
		Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
		Desa Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
		Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
			Pengadaan Jaring 2 inchi	10 Unit	
		Kelurahan Pelalawan Kecamatan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	

	Pelalawan	Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4"	10 Unit	
	Desa Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4"	10 Unit	
	Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Jaring 2.5 inchi	10 Unit	
	Kel. Langgam Kec. Langgam	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Sungai Ara Kec. Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Jaring 5 inchi	10 Unit	
	Desa Tambak Kec. Langgam	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Alat tangkap pengilar 1.5 inchi	10 Unit	
	Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras	Pengadaan Jaring 2.5 inchi	10 Unit	
		Pengadaan Alat tangkap pengilar 1.5 inchi	10 Unit	
	Desa Terusan Kec. Pkl Kerinci	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
		Pengadaan Jaring 2.5 inchi	10 Unit	
	Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	10 Unit	
	Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	20 Unit	
	Kelurahan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	10 Unit	
	Desa Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Bahan Alat Tangkap Pengilar /Gill Net (Ukuran mata jaring 2 inchi)	20 Unit	
	Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 8 Inchi)	40 Unit	
	Desa Bandar Pesisir Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Kapal Fiber 2 GT	10 Unit	
	Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti	Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	10 Unit	
	Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gill Net (Ukuran mata jaring 2 Inchi)	30 Unit	

PEKANBARU				
	Jl. Raja Panjang RT 02 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura, Kec. Rumbai Timur.	Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta kelengkapannya.	12 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT 02 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura, Kec. Rumbai Timur.		10 Unit	
	Jl. Pemuda Ujung Gg. Taufik RT 02 RW 08 Kel. Tirta Siak, Kec. Payung Sekaki.		10 Unit	
	Jl. Kemping RT 04 RW 07 Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai Timur.	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring Insang. Ukuran : 1,5 ~ 2.5 inchi	50 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT 03 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur.		50 Unit	
	Jl. Tanjung Batu RT 02 RW 03 Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh		50 Unit	
	Jl. Tanjung Batu No.136 RT 01 RW 03 Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh.		65 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT 03 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur.		50 Unit	
	Jl. Raja Panjang RT02 RW 04 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur.		65 Unit	
	Jl. Pesisir Ujung Rt 03 RW 09 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai		60 Unit	
	Jl. Pangambang RT 03 RW 07 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Timur		80 Unit	
	Jl. Pangambang RT 03 RW 07 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Timur		65 Unit	
	Jl. Pesisir Gg. Hiu RT 01 RW 09 Kel. Meranti Pandak Kec. Pesisir.		55 Unit	
KAMPAR				
	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Jaring Insang	10 Unit	
	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Jaring Insang	10 Unit	

		Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Jaring Insang	10 Unit	
		Desa Danau Lancang Kec, Tapung Hulu	Pengadaan Sampan Dayung Bahan Drum Plastik Beserta Mesin Tempel Sampan Nelayan	10 Unit	
		Desa Danau Lancang Kec, Tapung Hulu	Pengadaan Sampan Dayung Bahan Drum Plastik Beserta Mesin Tempel Sampan Nelayan	10 Unit	
		Desa Danau Lancang Kec, Tapung Hulu	Pengadaan Sampan Dayung Bahan Drum Plastik Beserta Mesin Tempel Sampan Nelayan	10 Unit	
		DUMAI			
		Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Pengadaan Kapal Fiber Mesin Inboard 1 GT	10 Unit	
		KUANSING			
			Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan		
		Kecamatan Cerenti	- Perahu Bermotor dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	10 Paket	
		Kecamatan Cerenti	- Perahu Bermotor dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	10 Paket	
			Pengadaan Benih Ikan Lokal		
		Kab. Kuantan Singingi	- Benih Ikan Baung	100000 Ekor	
		ROKAN HULU			
		Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jala Ikan 1 dan 2 Inchi,	18 Unit	
			Joran Pancing Sambung 2 dan Reel Pancing Viking ukuran 50/40 dan 50/70	18 Set	
			Tali Pancing PE ukuran 0,20 dan 0,35	18 Set	
			Jaring Bubu Ukuran 3/4 ukuran talu 2 mm	18 ball	
			Tali Pengikat Bbu Merk united uk 2,5 mm	36 gulung	
			Lukah/Penangkap ikan dari bambu	36 Unit	
			Kotak Fiber untuk pengawet ikan	18 Unit	
			Senter kepala cahaya kuning anti air merk LUBY tipe L2903k	18 Unit	
			Pisau Merk Camel	18 buah	
				Jala	10 Unit

			Jaring Bubu Ukuran 3/4 ukuran talu 2 mm	10 Unit	
			Sterofom box ikan	10 Unit	
			Jaring	20 ball	
			jala	10 Unit	
			Jaring Pengilar	20 kg	
			Mata Pancing	200 kotak	
			Tali Nilon 1/2 mm	200 ikat	
			Tali Nilon 2 mm	250 ikat	
			Tali Nilon 4 mm	100 gulung	
		Desa Mahato Kec. Tambusai Utara	Jaring pukat 6 inch \$ 0,40	30 ball	
			Jaring pukat 5 inch \$ 0,40 mata malang	30 ball	
			Jaring pukat 4 inch \$ 0,40 mata malang	30 ball	
			Jaring pukat 3 inch \$ 0,28 mata malang	30 ball	
			Jaring Pungilar 4 inch	100 kg	
			Jaring Pungilar 2 inch	100 kg	
			Tali PE*1*	10 ball	
			Tali PE*3*	30 ball	
			Tali PE*4*	30 ball	
		Desa Tanjung Medan Kec. Rokan IV Koto	Perahu Penangkap Ikan	10 unit	
			Mesin Koplit Tanap Kapal Perikanan	10 unit	
			Jala	10 buah	
			Jaring	10 kg	
			Rawai	10 kg	
2	BIDANG BUDIDAYA				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				
	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
		SIAK			
		Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung Fiber	5 unit	
		KEPULAUAN MERANTI			
		Desa Bantar Kec. Rangsang Barat	Bantuan Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1 unit	
		Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	3 unit	
		Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	2 unit	
		Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	1 unit	
		Desa Bantar Kec. Rangsang Barat	Bantuan Alat Tangkap Gumbang Sarana Pendukung Budidaya KJA	10 unit	
		INDRAGIRI HULU			
		Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA) dan benih ikan patin Spesifikasi : Konstruksi besi Galvanis Ukuran 4x5 meter Benih ikan Patin ukuran 8-12 cm	10 Paket	
		DUMAI			
		Desa Sialang Pasung Kec. Rangsang Barat	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	2 unit	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperaian darat yang dimanfaatkan		
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		

INDRAGIRI HILIR				
	Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Inhil	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Udang Vaname Semi Intensif	1	
	Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kab. Inhil	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Udang Vaname Semi Intensif	1 Paket	
	Desa Pengalihan kecamatan Keritang	Bantuan Sarana Keramaba Jaring Apung (KJA) Air Tawar	2 Paket	
KEPULAUAN MERANTI				
	Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	
	Desa Mengkirau Kec. Tasik Putri Puyu	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	
	Desa Padang Kamal Kec. Pulau Merbau	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	
	Desa Mengkopot Kec. Tasik Putri Puyu	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air tawar	1 Paket	
	Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi	Bantuan Sarana dan Prasarana BudidayaPerikanan Air payau (Benur udang)	1 Paket	
PELALAWAN				
	Desa Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci	Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA)	1 Paket	
	Kel. Langgam Kec. Langgam	Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA)	1 Paket	
	Kec. Pangkalan Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kec. Pangkalan Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kec. Bandar Seikijang	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Kelurahan Sorek Satu, Pkl. Kuras	Bantuan Induk Lele dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	Bantuan Bibit Udang Vaname dan saprokan tambak	2 Paket	
	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	Bantuan Bibit Udang Vaname dan saprokan tambak	2 Paket	
	Desa Banjar Panjang	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Banjar Panjang	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
	Desa Silikuan Hulu	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	

		Desa Air Hitam	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
		Desa Bukit Jaya	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
		Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
		Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci	Bantuan Bibit Gurami dan Saprokan	1 Paket	
		ROHIL			
		Jl. Kampung Baru Rt/Rw: 021/005 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko	Bantuan Pengadaan Spat Kerang	500 Kaleng	
		Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko	Bantuan Pengadaan Spat Kerang	1000 Kaleng	
		KAMPAR			
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Ranah, Desa Bukit Ranah, Kel. Air Tiris	Bantuan Sarana Jaring Apung (KJA)	4 Unit	
		Desa Pulau Terap, Empat Balai, Ranah, Air Tiris, Sendayan	Tiang Panjang Untuk Keramba	8 Unit	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan tersedia	300 Kg	
		Desa Lereng Kecamatan Kuok	Bantuan Calon induk Ikan Patin untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
		Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Patin untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
		Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
		Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
		Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
		Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar	Bantuan Calon induk Ikan Lele untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	300 Kg	
		DUMAI			
		Kel. Sungai Geniot Kec. Sungai Sembilan	Bantuan Pompa Meriam 8"	3	

	Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan	MCPI-70-100 KG/JAM *Full control" Mesin Pencetak	1 unit	
		Mixer Pencampur 400 kg/jam Medium	1 unit	
	Kel. Sungai Geniot Kec. Sungai Sembilan	Terpal HDPE	12 roll	
		Kincir Air	8 unit	
		Benur	300000 ekor	
	Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur	Hiblow Air Pum (HP 200)	20 unit	
		Bak Fiber (uk. 2m X 1m X 0.4m)	20 unit	
	Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur	Mesin Pembuat Pakan	1 unit	
	Kel. Bukit nenas Kec. Bukit Kapur	Mesin Pembuat Pakan	1 unit	
	Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur	Kolam Bulat Terpal Diameter 2	40 unit	
		Benih Ikan Lele	50000 ekor	
	Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai	Terpal HDPE	10 roll	
		Kincir Air	5 unit	
	Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai	Terpal HDPE	10 roll	
		Kincir Air	5 unit	
	Kel. Mundam Kec. Medang Kampai	GENSET SILENT 20 KVA	1 unit	
		Terpal HDPE	2 roll	
	Kel. Mundam Kec. Medang Kampai	Kolam Bulat Terpal Diameter 2	5 unit	
		Benih Ikan Lele	10000 ekor	
	Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan	Keramba (UK. 3 X 4) Jaring Tancap	15 unit	
		Benih Ikan Lele	50000 ekor	
	Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan	Terpal Kolam Ikan Air Tawar	2 roll	
		Benih Ikan Lele	50000 ekor	
	Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur	Keramba (UK. 3 X 4) Jaring Tancap	15 unit	
		MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	5 unit	
		BAK FIBER (uk. 2m X 1m X 0.5m)	12 unit	

			Benih Ikan Nila	10000 ekor		
			Benih Ikan Gurami	10000 ekor		
		Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur	MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	3 unit		
			KOLAM BULAT TERPAL DIAMETER 3	10 unit		
			Benih Ikan Nila	10000 ekor		
			Benih Ikan Gurami	10000 ekor		
		Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur	BAK FIBER (uk. 2m X 1m X 0.5m)	15 unit		
			MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	3 unit		
			Benih Ikan Nila	5000 ekor		
			Benih Ikan Gurami	5000 ekor		
		Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur	KOLAM BULAT DIAMETER 3	5 unit		
			FILTER AIR TABUNG FIBER	2 Paket		
			Benih Ikan Nila	10000 ekor		
			Benih Ikan Gurami	10000 ekor		
		Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Dumai Timur	BAK FIBER (uk. 2m X 1m X 0.5m)	15 unit		
			MESIN POMPA UDARA/AERATOR (HP 100)	3 unit		
			Benih Ikan Nila	10000 ekor		
			Benih Ikan Gurami	10000 ekor		
		ROKAN HULU				
		Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket		
		Desa Babussalam Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket		
		Desa Koto Tinggi Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Patin	1 Paket		
		Desa Babussalam Kec. Rambah	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket		
		Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket		
		Desa Sungai Kumango Kec. Tambusai	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket		
		Desa Kabun Kec. Kabun	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket		
		Desa Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah Darussalam	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket		

		Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
		Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
		Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele	1 Paket	
		Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu	Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Nila dan Patin	1 Paket	
3	BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN				
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
		PELALAWAN			
		Desa Teluk, Kecamatan Kuala Kampar	Bantuan Bibit Mangrove	1 Hektar	
		Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar	Bantuan Bibit Mangrove	1 Hektar	
4	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASAARAN HASIL PERIKANAN				
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peralatan Pengolahan yang difasilitasi		
		KAMPAR			
		Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa	IQF (Individual Quick Freezing)	1 unit	
		Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa	Detector Logam	1 unit	
		Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa	Bangunan IQF	1 unit	

	Pemberikan insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			2 Paket	
		Dumai			
			Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberikan insentif dan fasilitasi		
			Alat pengolahan dan pemasaran	2 PAKet	
		KUANSING			
		Kab. Kuantan Singingi	Pemberian Insentif untuk Pemasar Produk Perikanan Lintas Kabupaten/Kota		
		Kab. Kuantan Singingi	- Insentif untuk Pemasar Ikan	10 Unit Usaha	
			Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		
		Gunung Toar	- Pengadaan Bantuan Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Poklasar	12 Unit Usaha	
5	UPT. PELABUHAN PERIKANAN				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola		
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		
		INDRAGIRI HILIR			

		Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1 Unit	
6	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN				
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan		
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		KAMPAR			
		Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu	Pengadaan Bibit Ikan Baung dan Mahseer/Gadi Untuk Restocking		
		Desa Deras Tajak Kec. Kampar Kiri Hulu	Pengadaan Bibit Ikan Baung dan Mahseer/Gadi Untuk Restocking	50000 Ekor	
		Desa Tanjung Belit Selatan Kec. Kampar Kiri Hulu	Pengadaan Bibit Ikan Baung dan Mahseer/Gadi Untuk Restocking	50000 Ekor	
		KUANSING			
		Sentajo Raya	Pengadaan Sarana Pembenihan Pada UPTD BBIPP Teso (Pengadaan Calon Induk Ikan Nila dan Pakan Ikan)	5 Paket	
			- Calon Induk Ikan Nila	2000 Kg	
			- Pakan Induk	300 Kg	
			- Pakan Benih	1 Paket	
			Peralatan Pembenihan		
		Kuantan Tengah	Pengadaan Sarana Pembenihan Pada UPTD PBPPP Sungai Jering (Pengadaan Calon Induk Ikan, Pakan Ikan dan Peralatan Pembenihan)		
			- Calon Induk Ikan Lele	100 Kg	
			- Pakan Induk	700 Kg	

			- Pakan Benih	300 Kg	
			Peralatan Pembenihan	1 Paket	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		KUANSING			
		Sentajo Raya	Pengadaan Prasarana Pada UPTD BBIPP Teso		
			- Pembangunan Pagar Keliling UPTD BBIPP Teso	300 Meter	
		Kuantan Tengah	Pengadaan Prasarana Pada UPTD PBPPP Sungai Jering		
			- Pembangunan Pagar Keliling UPTD PBPPP Sungai Jering	150 Meter	
			- Rehabilitasi Kolam UPTD PBPPP Sungai Jering	300 M ²	
			- Pembangunan Pagar Kolam Induk Ikan	300 Meter	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 diharapkan menjadi satu upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap program dan kegiatan yang benar-benar produktif yang diperuntukkan bagi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain adanya penyesuaian anggaran.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 memiliki Rp. 75.063.762.957,- untuk perubahan sebesar Rp 41.715.138.930,- ada pengurangan Rp. 33.348.624.027.

Pagu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan ini terdapat program yang dirumuskan mengalami perubahan yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- e. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.
- f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Secara rinci tabel Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada Tabel 3.1.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Rens tra OPD	Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Pr aki raa n Ca pai an Tar get RE NJ A OP D Ta hu n 20 24	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasio nal	Daerah

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00							
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00							
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00							
1	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 persen	100 persen	32.667.341.105,00	33.558.550.682,00	37.975.898.775,00						
	3	25	01	1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	202.416.000,00	202.416.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	
	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	102.416.000,00	21.600.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	-			5 Laporan	5 Laporan	21.717.440.567,00	24.112.804.879,00	24.112.804.879,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	
	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				143 Orang/ Bulan	211 Orang/ Bulan	21.717.440.567,00	24.112.804.879,00	30.691.566.886,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-			6 Jenis	6 Jenis	350.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Perangkat Daerah															
	3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				14 Laporan	14 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	49.785.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	17.815.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-		6 Jenis	6 Jenis	2.577.184.710,00	2.426.744.119,00	2.426.744.119,00			-		Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	235.002.000,00	235.002.000,00	57.793.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	103.300.873,00	103.300.873,00	103.300.873,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155 Laporan	155 Laporan	1.138.464.000,00	1.094.528.800,00	396.667.215,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-		2 Jenis	2 Jenis	218.934.825,00	189.714.475,00	189.714.475,00			-		Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
						Urusan Pemerintah Daerah														
	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	135.494.125,00	135.494.125,00	139.257.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	25	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-		2 Jenis	2 Jenis	5.899.874.001,00	4.769.491.856,00	4.769.491.856,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	
	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.169.992.995,00	1.769.992.995,00	1.889.992.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				44 Laporan	44 Laporan	1.377.556.156,00	848.909.977,00	910.702.408,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-		27 Jenis	27 Jenis	1.753.907.002,00	1.707.379.353,00	1.707.379.353,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				27 Unit	27 Unit	267.166.295,00	355.966.295,00	355.966.295,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				278 Unit	278 Unit	153.000.000,00	153.000.000,00	122.600.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	574.820.000,00	574.820.000,00	519.340.974,00	Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
2	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola			280.624 Ha	280624 Ha	450.132.217,00	1.067.626.298,00	52.137.000,00						
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-		18.539,1 Ha	-	450.132.217,00	1.067.626.298,00	1.067.626.298,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	
	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				144633,73 Ha	144633,73 Ha	250.000.000,00	1.067.626.298,00	52.137.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pangan	-	Penguatan Ekonomi		

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	Akuatik- Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional				
	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil															
							Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				3 Ha	3 Ha	200.132.217,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/															
							Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Izin yang Diterbitkan	-			8 izin	8 izin	0,00	0,00	0,00				-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan
	3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir															
							Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
3	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				140000 Ton	127800 Ton	6.024.143.813,00	31.889.571.811,00	2.808.796.630,00						
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	-			3 Wilayah	3 Wilayah	3.451.561.170,00	1.681.342.865,00	1.681.342.865,00				-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan
	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan															
							Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	174.710.000,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap															
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Unit	1 Unit	373.296.828,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap															

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1760 Unit	1760 Unit	2.898.264.342,00	1.506.632.865,00	1.635.625.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan	-		4 Wilayah	4 Wilayah	2.159.550.000,00	1.506.759.500,00	1.506.759.500,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan
	3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Dokumen	1 Dokumen	218.920.000,00	216.265.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1545 0	1545 0	1.940.630.000,00	1.290.494.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	-		170 izin	170 izin	213.032.643,00	160.687.244,00	160.687.244,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil													
						Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase	100 Persentase	137.307.648,00	91.462.454,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil													
						Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	75.724.995,00	69.224.790,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
4	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			132712,51 Ton	128115,02 Ton	6.257.866.117,00	5.997.743.752,00	791.059.525,00					
	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-		5 Izin	5 Izin	20.000.000,00	0,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan
	3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan													
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan	-		3 Izin	3 Izin	10.000.000,00	0,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	25	04	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT														
						Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	-			100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	70.000.000,00	0,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan
	3	25	04	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				250 Rekomendasi	250 Rekomendasi	70.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan	-			5 Kawasan	5 Kawasan	285.663.000,00	167.674.000,00	167.674.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan
	3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	59.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
						Jumlah Pembudidaya				90 Orang	90 Orang	125.000.000,00	66.011.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	101.663.000,00	101.663.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-		5 Kawasan	-	5.872.203.117,00	5.830.069.752,00	5.830.069.752,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				88 Unit	88 Unit	2.600.000.000,00	1.074.730.085,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	603.842.105,00	603.842.105,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
5	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani			7 Kasus	7 Kasus	1.699.752.952,00	1.836.980.374,00	74.375.000,00					
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi	-		245 Pelaku Usaha	245 Pelaku Usaha	1.599.752.953,00	1.736.980.375,00	1.736.980.375,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan
	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)													
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				-	4 Kelompok Masyarakat	0,00	473.760.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Mudik, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah														
						Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan				2 Forum	2 Forum	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	umlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diterawasi	-			40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	99.999.999,00	99.999.999,00	99.999.999,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan
	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
						Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	39.999.999,00	39.999.999,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
6	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan				29845,28 Ton	29845,28 Ton	1.004.165.000,00	713.290.040,00	12.872.000,00					
	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan	-			6 Izin	6 Izin	50.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														Perikanan	
	3	25	06	1.01	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri														
						Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	35.250.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	-			4 Unit	4 Unit	954.165.000,00	678.040.040,00	678.040.040,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan
	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
						Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				2 Kegiatan	2 Kegiatan	691.866.418,00	453.876.621,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
						Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	58.200.000,00	35.670.000,00	5.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko													
	3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan Yang Tersedia	-		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan
	3	25	06	1.03	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
						Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
						Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
7	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen	32.667.341.105,00	33.558.550.682,00	37.975.898.775,00					
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-		6 Jenis	6 Jenis	2.577.184.710,00	2.426.744.119,00	2.426.744.119,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	43.823.906,00	9.077.906,00	4.421.591,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	10.032.000,00	10.032.000,00	1.334.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31 Laporan	31 Laporan	88.930.000,00	77.980.000,00	16.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah jenis jasa penunjang urusan	-		2 Jenis	2 Jenis	5.899.874.001,00	4.769.491.856,00	4.769.491.856,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Urusan Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah yang dipenuhi														
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	207.514.560,00	169.714.560,00	176.347.160,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	3 Jenis	1.753.907.002,00	1.707.379.353,00	1.707.379.353,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	15.332.300,00	15.332.300,00	4.377.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	9.940.000,00	6.220.000,00	1.830.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
8	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani				7 kasus	7 kasus	1.699.752.952,00	1.836.980.374,00	74.375.000,00					
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi	-			80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	1.599.752.953,00	1.736.980.375,00	1.736.980.375,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan
	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	16.760.000,00	8.380.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	352.595.800,00	220.372.375,00	39.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		
						UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
9	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	32.667.341.105,00	33.558.550.682,00	37.975.898.775,00						
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	-			6 Jenis	6 Jenis	2.577.184.710,00	2.426.744.119,00	2.426.744.119,00				-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	113.561.087,00	45.935.087,00	9.639.400,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17.664.000,00	17.664.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.023.340,00	6.023.340,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	86.700.000,00	86.700.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-			2 Jenis	2 Jenis	5.899.874.001,00	4.769.491.856,00	4.769.491.856,00				-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	208.721.040,00	196.153.540,00	182.264.880,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	3 Jenis	1.753.907.002,00	1.707.379.353,00	1.707.379.353,00				-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	75.381.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	19.510.000,00	19.510.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
10	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani				7 Kasus	7 Kasus	1.699.752.952,00	1.836.980.374,00	74.375.000,00						
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	-			80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	1.599.752.953,00	1.736.980.375,00	1.736.980.375,00				-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						sampai dengan 12 Mil														Perikanan
	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	47.790.000,00	47.790.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	539.335.153,00	491.758.000,00	0,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
						UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
11	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen	32.667.341.105,00	33.558.550.682,00	37.975.898.775,00						
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	-		6 Jenis	6 Jenis	2.577.184.710,00	2.426.744.119,00	2.426.744.119,00				-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	20.357.774,00	20.357.774,00	7.422.160,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	7.728.000,00	7.728.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	2.031.122,00	2.031.122,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	10 Laporan	41.585.000,00	41.585.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-		2 Jenis	2 Jenis	218.934.825,00	189.714.475,00	189.714.475,00				-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	58.440.700,00	29.220.350,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-		3 Jenis	3 Jenis	5.899.874.001,00	4.769.491.856,00	4.769.491.856,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8 Laporan	8 Laporan	231.515.456,00	197.515.456,00	200.120.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	231.515.456,00	197.515.456,00	200.120.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-		3 Jenis	3 Jenis	1.753.907.002,00	1.707.379.353,00	1.707.379.353,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	21.310.600,00	21.310.600,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	21.310.600,00	21.310.600,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	30.100.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	30.100.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9 Unit	9 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
12	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani			7 Kasus	7 Kasus	1.699.752.952,00	1.836.980.374,00	74.375.000,00					
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	-		85 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	1.599.752.953,00	1.736.980.375,00	1.736.980.375,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan
	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	535.872.000,00	387.520.000,00	35.125.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	535.872.000,00	387.520.000,00	35.125.000,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi													

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
						UPT. BUDIDAYA PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
13	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen	32.667.341.105,00	33.558.550.682,00	37.975.898.775,00					
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	-		4 Jenis	4 Jenis	2.577.184.710,00	2.426.744.119,00	2.426.744.119,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	42.710.794,00	55.905.744,00	53.347.047,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	12.387.395,00	12.387.395,00	3.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	1.367.317,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			28 Laporan	28 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	18.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-		3 Jenis	3 Jenis	5.899.874.001,00	4.769.491.856,00	4.769.491.856,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 Laporan	18 Laporan	982.308.480,00	982.308.480,00	853.088.480,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	3 Jenis	1.753.907.002,00	1.707.379.353,00	1.707.379.353,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah	
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	102.275.320,00	107.265.320,00	27.651.200,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	63.010.000,00	16.810.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
14	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				132712,51 Ton	128115,02 Ton	6.257.866.117,00	5.997.743.752,00	791.059.525,00						
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dipelihara darat yang dimanfaatkan	-			5 Kawasan	5 Kawasan	5.872.203.117,00	5.830.069.752,00	5.830.069.752,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan	
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	10 Unit	2.668.361.012,00	2.909.978.682,00	785.465.625,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	2 Unit	0,00	1.241.518.880,00	5.593.900,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	-	Penguatan Ekonomi		
						UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN								48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00					

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	32.667.341.105,00	33.558.550.682,00	37.975.898.775,00					
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	-			6 Jenis	6 Jenis	2.577.184.710,00	2.426.744.119,00	2.426.744.119,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.972.206,00	9.972.206,00	3.393.416,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.139.858,00	2.139.858,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	27.750.000,00	27.750.000,00	5.210.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-			2 Jenis	2 Jenis	5.899.874.001,00	4.769.491.856,00	4.769.491.856,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	289.412.514,00	172.044.048,00	222.917.288,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	3 Jenis	1.753.907.002,00	1.707.379.353,00	1.707.379.353,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	21.023.838,00	21.023.838,00	10.466.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	13.150.000,00	13.150.000,00	2.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
16	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan				29845,28 Ton	29845,28 Ton	1.004.165.000,00	713.290.040,00	12.872.000,00					

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan	-			4 Unit	4 Unit	954.165.000,00	678.040.040,00	678.040.040,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil kelautan Perikanan
	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
						Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				10 Kegiatan	10 Kegiatan	204.098.582,00	188.493.419,00	7.052.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
						UPT. PELABUHAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						48.103.401.204,00	75.063.762.957,00	41.715.138.930,00						
17	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	32.667.341.105,00	33.558.550.682,00	37.975.898.775,00					
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	-			6 Jenis	6 Jenis	2.577.184.710,00	2.426.744.119,00	2.426.744.119,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16.816.639,00	16.167.314,00	14.270.290,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.200.000,00	11.200.000,00	4.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.864.716,00	9.505.700,00	7.211.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	96.370.000,00	91.000.000,00	29.980.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-			3 Jenis	3 Jenis	5.899.874.001,00	4.769.491.856,00	4.769.491.856,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	432.852.800,00	432.852.800,00	408.852.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi		

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	3 Jenis	1.753.907.002,00	1.707.379.353,00	1.707.379.353,00			-	Penguatan Ekonomi	Aparatur Pemerintah
	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	73.440.000,00	73.440.000,00	72.152.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	147.850.000,00	147.850.000,00	113.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	148.088.649,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	
18	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				140000 Ton	127800 Ton	6.024.143.813,00	31.889.571.811,00	2.808.796.630,00					
	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	-			1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	28.540.782.202,00	28.540.782.202,00			-	Penguatan Ekonomi	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan
	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	28.540.782.202,00	1.173.171.630,00	Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	-	Penguatan Ekonomi	

Secara rinci sub kegiatan yang mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan yaitu :

1. SEKRETARIAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu anggaran 60.519.000,- dan realisasi 10.80.000,- persentase 17,85 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Pagu anggaran 23.729.500,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah Pagu anggaran 23.048.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu anggaran 24.112.804.879,- dan realisasi 16.786.792.509,- persentase 69,62 %. Sedangkan target kinerja 143 Orang dan realisasi 143 Orang, dengan tingkat capaian kinerja 50 %.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pagu anggaran 49.785.000,- dan realisasi 36.392.000,- persentase 73,10 %. Sedangkan target kinerja 14 Laporan dan realisasi 10 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 71,42 %.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pagu anggaran 39.595.000,- dan realisasi 7.784.000,- persentase 19,66 %. Sedangkan target kinerja 14 Laporan dan realisasi 3 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 21,42 %.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu anggaran 90.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 Paket dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 200.000.000,- dan realisasi 197.858.610,- persentase 98,93 %. Sedangkan target kinerja 5 Paket dan realisasi 5 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 111.793.000,- dan realisasi 34.946.000,- persentase 31,26 %. Sedangkan target kinerja 5 Paket dan realisasi 2 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 40 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran 103.300.873,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 15 Paket dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 541.328.000,- dan realisasi 50.163.542,- persentase 9,27 %. Sedangkan target kinerja 155 Paket dan realisasi 1, dengan tingkat capaian kinerja 10%.

- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pagu anggaran 25.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 11 Dokumen dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu anggaran 1.769.992.995,- dan realisasi 871.943.375,- persentase 49,26 %. Sedangkan target kinerja 4 laporan dan realisasi 2 Laporan , dengan tingkat capaian kinerja 50%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 1.007.523.998,- dan realisasi 405.115.876,- persentase 40,21 %. Sedangkan target kinerja 44 laporan dan realisasi 18 Laporan , dengan tingkat capaian kinerja 40,90%.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 139.257.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 14 Unit dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 25.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 3 Unit dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 355.966.295,- dan realisasi 138.833.784,- persentase 39,00 %. Sedangkan target kinerja 27 Unit dan realisasi 11 Unit , dengan tingkat capaian kinerja 40,00%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 153.000.000,- dan realisasi 87.540.000,- persentase 57,22 %. Sedangkan target kinerja 278 Unit dan realisasi 159 Unit , dengan tingkat capaian kinerja 57,19%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 574.820.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Unit dan realisasi 0 , dengan tingkat capaian kinerja 0%.

2. BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Pagu anggaran 144.627.500,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 144633,73 Ha, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah Pagu anggaran 9.791.850,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 Forum, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 15.250.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 10 Pelaku Usaha, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya Pagu anggaran 28.675.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 20 Pelaku Usaha, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

3. BIDANG TANGKAP

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Pagu anggaran 95.147.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pagu anggaran 1.659.595.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1926 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Pagu anggaran 119.986.500,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pagu anggaran 68.815.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1545 Unit dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Pagu anggaran 41.515.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 100%, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Pagu anggaran 36.487.395,- dan realisasi 0,- persentase 0 %.

Sedangkan target kinerja 1 Dokumen, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

4. BIDANG BUDIDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pagu anggaran 29.097.114,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 90 Orang, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 57.283.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 10 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 1.033.720.815,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 88 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 535.288.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 Unit, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

5. BIDANG P2HKP

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Pagu anggaran 17.245.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 6 Dokumen, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Pagu anggaran 225.635.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 Kegiatan, dan realisasi 0, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Pagu anggaran 17.985.000,- dan realisasi 5.084.000,- persentase 28,27 %. Sedangkan target kinerja 1 Kegiatan, dan realisasi 1 Kegiatan, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.

6. UPT. WILAYAH I

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 4.421.591,- dan realisasi 4.401.000,- persentase 99,53 %. Sedangkan target kinerja 9 paket, dan realisasi 9 paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 5.008.000,- dan realisasi 1.334.000,- persentase 22,64 %. Sedangkan target kinerja 16 paket, dan realisasi 4 paket, dengan tingkat capaian kinerja 25 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Pagu anggaran 1.385.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 11 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 38.940.000,- dan realisasi 11.510.000,- persentase 29,56 %. Sedangkan target kinerja 31 Laporan, dan realisasi 9 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 29 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 176.347.160,- dan realisasi 80.130.380,- persentase 45,44 %. Sedangkan target kinerja 7 Laporan, dan realisasi 3 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 43 %.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 15.332.300,- dan realisasi 3.350.192,- persentase 21,85 %. Sedangkan target kinerja 2 unit, dan realisasi 1 unit, dengan tingkat capaian kinerja 50 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 6.220.000,- dan realisasi 1.450.000,- persentase 23,31 %. Sedangkan target kinerja 13 unit, dan realisasi 3 unit, dengan tingkat capaian kinerja 23,07 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 4.020.000,- dan realisasi 0,- persentase 0

%. Sedangkan target kinerja 5 pelaku usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 190.942.375,- dan realisasi 27.380.000,- persentase 14.34 %. Sedangkan target kinerja 30 pelaku usaha, dan realisasi 4 pelaku usaha, dengan tingkat capaian kinerja 13,33 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Pagu anggaran 13.700.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 8 Pelaku Usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

7. UPT. WILAYAH II

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 22.967.544,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 6 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 8.832.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Pagu anggaran 3.011.670,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 43.350.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 12 Laporan, dan realisasi 0 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 203.694.040,- dan realisasi 101.344.500,- persentase 49.75 %. Sedangkan target kinerja 5 Laporan, dan realisasi 2 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 40.00 %.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 75.381.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 2 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 19.510.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 3 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 23.840.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 10 pelaku usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 414.928.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 180 pelaku usaha, dan realisasi 0 pelaku usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

8. UPT. WILAYAH III

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 18.851.749,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 6 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 3.860.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Pagu anggaran 1.008.626,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 paket, dan realisasi 0 paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 20.775.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 10 Laporan, dan realisasi 0 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 29.220.350,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 8 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 214.515.031,- dan realisasi 95.814.620,- persentase 44.67 %. Sedangkan target kinerja 8 Laporan, dan realisasi 3 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 43 %.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran

21.310.600,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 1 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 30.100.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 3 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 5.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 9 unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 14.440.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 8 pelaku usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pagu anggaran 341.94.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 75 pelaku usaha, dan realisasi 0 pelaku usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.
- Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Pagu anggaran 15.220.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 Pelaku Usaha, dan realisasi 0 Pelaku Usaha, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.

9. UPT BUDIDAYA PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 82.491.997,- dan realisasi 11.707.885,- persentase 14,19 %. Sedangkan target kinerja 6 paket, dan realisasi 1 paket, dengan tingkat capaian kinerja 16,6 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 7.480.000,- dan realisasi 3.790.000,- persentase 50,67 %. Sedangkan target kinerja 6 paket, dan realisasi 3 paket, dengan tingkat capaian kinerja 50 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran 7.846.317,- dan realisasi 1.316.000,- persentase 16,77 %. Sedangkan target kinerja 28 Laporan, dan realisasi 5 laporan, dengan tingkat capaian kinerja 17 % .
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 42.201.875,- dan realisasi 13.483.000,- persentase 31,95 %. Sedangkan target kinerja 1 Jenis, dan realisasi 1 Jenis, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 981.308.480,- dan realisasi 475.521.185,- persentase 48,46 %. Sedangkan target kinerja 3 Jenis, dan realisasi 2 Jenis, dengan tingkat capaian kinerja 66 % .

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 107.265.320,- dan realisasi 21.453.400,- persentase 20 %. Sedangkan target kinerja 15 Unit, dan realisasi 3 unit, dengan tingkat capaian kinerja 20 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 35.510.000,- dan realisasi 3.950.000,- persentase 11,12 %. Sedangkan target kinerja 15 Unit, dan realisasi 2 unit, dengan tingkat capaian kinerja 13,33 %.

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 2.110.242.590,- dan realisasi 28.275.500,- persentase 1,34 %. Sedangkan target kinerja 8 Unit, dan realisasi 1 unit, dengan tingkat capaian kinerja 12,5 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran 159.909.844,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 5 Unit, dan realisasi 0 unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %

10. UPT PMHP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 5.424.707,- dan realisasi 1.251.200,- persentase 23,06 %. Sedangkan target kinerja 5 Paket, dan realisasi 1 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 20 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran 1.081.760,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 4 Paket, dan realisasi 0 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 13.950.000,- dan realisasi 5.165.000,- persentase 37,03 %. Sedangkan target kinerja 4 Laporan, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 25 %.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 233.976.688,- dan realisasi 130.259.624,- persentase 55,67 %. Sedangkan target kinerja 10 Laporan, dan realisasi 5 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 50 % .

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 21.023.838,- dan realisasi 7.663.000,- persentase 36,45 %. Sedangkan target kinerja 3 Unit, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 33,33 % .
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 13.150.000,- dan realisasi 2.850.000,- persentase 21.67 %. Sedangkan target kinerja 3 Unit, dan realisasi 1 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 33,33 % .
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran 25.000.000,- dan realisasi 0,- persentase 0 %. Sedangkan target kinerja 9 Unit, dan realisasi 0 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Pagu anggaran 165.734.419,- dan realisasi 5.552.000,- persentase 3,35 %. Sedangkan target kinerja 10 Kegiatan, dan realisasi 1 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 10 %.

11. UPT PELABUHAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran 14.270.290,- dan realisasi 14.185.400,- persentase 99,41 %. Sedangkan target kinerja 6 Paket, dan realisasi 6 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu anggaran 5.600.000,- dan realisasi 4.318.242,- persentase 77,11 %. Sedangkan target kinerja 1 Paket, dan realisasi 1 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran 7.211.100,- dan realisasi 6.524.000,- persentase 90,47 %. Sedangkan target kinerja 1 Paket, dan realisasi 1 Paket, dengan tingkat capaian kinerja 0 % .
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu anggaran 45.247.500,- dan realisasi 17.740.000,- persentase 39,21 %. Sedangkan target kinerja 1 Laporan, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 100 % .

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran 432.852.800,- dan realisasi 215.356.680,- persentase 49,75 %. Sedangkan target kinerja 1 Laporan, dan realisasi 1 Laporan, dengan tingkat capaian kinerja 50 % .

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu anggaran 73.440.000,- dan realisasi 22.005.230,- persentase 29,96%. Sedangkan target kinerja 3 Unit, dan realisasi 1 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 33,33 % .
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu anggaran 147.850.000,- dan realisasi 80.424.055,- persentase 54,40 %. Sedangkan target kinerja 5 Unit, dan realisasi 3 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 60 %.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pagu anggaran 1.173.171.630,- dan realisasi 750.000,- persentase 0,06 %. Sedangkan target kinerja 1 Unit, dan realisasi 0 Unit, dengan tingkat capaian kinerja 0 %.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Apabila program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 di pengaruhi oleh APBD maka program dan kegiatan akan di prioritaskan untuk berkaitan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi misi yang di dukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Kaidah-kaidah dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau merupakan pedoman yang telah ditetapkan dalam Renja ini, Disamping itu semangat dan tekad, serta disiplin dari pelaksana yang diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Kerja ini setiap tahunnya dibuat oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang menuntun secara keseluruhan program/kegiatan agar lebih terfokus yang nantinya dievaluasi dan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka tindak lanjutnya akan menggunakan Renja Perubahan Tahun 2025 ini sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pekanbaru, September 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU,



H. YURNALIS, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya/IV d
NIP. 19710417 200212 1 006